

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DKI JAKARTA TAHUN 2011-2020**

**Fika Fadilla Fani<sup>1</sup>, Sugi Suhartono<sup>2</sup>**

Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia. Corresponding Author. Email: [fikafadillaf@gmail.com](mailto:fikafadillaf@gmail.com)

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia. Email: [sugi.suhartono@kwikkiangie.ac.id](mailto:sugi.suhartono@kwikkiangie.ac.id)

**Article Info**

**Article History:**

Submission :  
Revised :  
Accepted :

**Keywords:**

Motor Vehicle Tax, Transfer Fee for Motor Vehicles, Motor Vehicle Fuel Tax, Parking Tax, Regional Original Income

**Citation:**

**DOI:**

**URL:**

**Abstract**

*Regional Original Income (PAD) is income derived from sources within the region, the greater the contribution of PAD in the form of regional finance, so that the greater the economic power that a region has to carry out regional preparation activities. Of the four sources of PAD, Regional Tax is the largest source of PAD revenue. This research was conducted to test whether the receipt of motorized vehicle tax, transfer fees for motorized vehicles, motorized vehicle fuel taxes, and parking taxes have an effect on PAD. This study uses data collection techniques observation method, namely note analysis. The variables used in this research are Motor Vehicle Tax, Transfer Fee for Motor Vehicles, Motor Vehicle Fuel Tax, and Parking Tax as independent variables and PAD as dependent variable. The sample in this study are four types of local taxes. The sampling technique in this study used purposive sampling and used descriptive statistics, classical assumption test, F statistic test, t statistic test, and coefficient of determination. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that it is proven that the Motor Vehicle Tax, Transfer Fee for Motor Vehicles, and Parking Tax have a positive and significant effect on PAD. While the Motor Vehicle Fuel Tax is not proven to have a positive and significant effect on PAD.*

**1. Pendahuluan**

Tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi kalimat "terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur". Pemerintah secara mendalam melakukan kebijakan untuk meningkatkan keselarasan dan kesinambungan dengan pembangunan nasional. Sehingga pemerintah pusat dan daerah mencari upaya agar pemasukan Pendapatan Negara dapat membiayai keperluan Negara. Indonesia sudah lebih maju dalam pembangunan ekonomi daerah sehingga membuat Negara menjadi lebih mandiri dalam melaksanakan sistem pemerintahan. Peran pemerintah daerah berguna mengetahui dana yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan daerah karena pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui kondisi daerahnya.

Didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Penerimaan dan Belanja Daerah. Salah satu sumber penerimaan dana pemerintah adalah pajak. Pajak sangat menentukan besar kecilnya anggaran Negara dalam membiayai pengeluaran Negara baik pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan rutin. Pendapatan daerah adalah suatu pencerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipastikan pemungutannya di suatu peraturan daerah, dan para pembayar pajak bukan memperoleh kompensasi secara tepat dari pemerintah daerah (Anggoro, 2017). Menurut Firdausy (2018) Setiap daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan berasal dari sumber-sumber dalam kewasannya, semakin besar kontribusi PAD dalam bentuk keuangan daerah, sehingga semakin besar daya perekonomian yang dipunyai suatu daerah untuk melakukan aktivitas penyusunan daerahnya. PAD berasal dari penerimaannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD diucapkan baik

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang menutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan kritik dan tinjauan atau masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk memadati pembiayaan penyusunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD.

Dimasa pandemi ini masyarakat yang ingin membeli mobil maupun sepeda motor lebih memilih membeli yang bekas pakai karena jauh lebih murah dengan kualitas cukup bagus sehingga dapat meningkat penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010. BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dala badan usaha. Wajib pajak BBN-KB wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak saat penyerahan, penguasaan kendaraan melebihi 12 bulan diluar perjanjian sewa beli dianggap sebagai penyerahan. (bprd.jakarta.go.id).

Menurut Mulya Sasongko (2020), Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menitikbkan pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak. Target BPRD DKI soal penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2019 sebesar Rp8,8 Triliun tercapai dan meningkat dari tahun 2018 yang hanya Rp 8,55 Triliun. Saat ini BPRD bekerja sama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya untuk menagih para penunnggak pajak, dengan melakukan salah satunya operasi gabungan sehingga terlihat yang menunggak pajak dan menyuruhnya segera melakukan pembayaran tunggaknya tersebut. Pajak kendaraan mewah dikenakan 2% dari harga mobil untuk kepemilikan mobil pertama. 2,5% untuk kepemilikan mobil ke dua. Tarif progresif 0,5% itu berlaku hingga kepemilikan kendaraan ke-17. Jika tidak tepat waktu dalam membayar pajak maka diekanakan denda 2% dari tunggakan. Maksimal denda yang ditetapkan 2 tahun atau 48 persen dari pajak terhutang. (pajakonline.com).

Sebanyak 5,1 juta kendaraan di DKI Jakarta belum membayar pajak kendaraannya. Rasio jumlah kendaraan yang menunggak pajak terdiri dari 70 persen roda empat dan 30 persen roda dua. Kepala Unit PKB dan BBN-KB potensi pendapatan Rp 2,1 Triliun yang akan didapat pada tahun 2019 (metro.tempo.co). Pada tahun 2020 terjadi wabah virus yang dimana pemerintah menerapkan pemutihan denda maupun pengurangan tarif PKB hingga akhir tahun 2020. Pertengahan tahun 2020 sebanyak 6.183.376 dari 10.500.000 kendaraan bermotor masih menunggak pajak . Dari jumlah itu artinya belum mencapai 50 persen jumlah wajib pajak yang menjalankan kewajibannya. Menurut Herliana (2020), paling banyak yang menunggak PKB ialah pemilik motor. Jumlahnya mencapai 5.145.180 kendaraan. Berdasarkan Bapenda, realisasi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 5,2 Triliun dari target APBD 2020 sebesar Rp 9,5 Triliun. Menurut Mohammad Tsani (2020) menuturkan realisasi penerimaan pajak baru menyentuh Rp 17,5 Triliun atau sekitar 34,48 persen dari target awal 50,92 Triliun. Masih banyak para pelaku Wajib Pajak yang menunggak membayar pajak dikarenakan kurangnya edukasi pajak, tingkat pendidikan cukup rendah dan tidak ada pendidikan pajak sama sekali. (jakarta.bisnis.com)

Dengan banyaknya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya maka kebutuhan bahan bakar pun semakin meningkat yang menjadikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) pun ikut meningkat. PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor yang setiap tahun penerimaannya selalu meningkat sehingga dapat memperkuat struktur penerimaan daerah dan meningkatkan efisiensi perkembangan otonomi daerah.

Di Kota Jakarta banyak tempat wisata yang mempunyai potensi besar yang bisa dikunjungi oleh banyak turis lokal maupun turis mancanegara sehingga memberikan peluang pendapatan yang besar terhadap Pajak Parkir. Banyaknya turis lokal maupun turis mancanegara menggunakan kendaraan pribadi, adapun karya wisata yang menggunakan bus pariwisata sehingga sangat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan tempat parkir yang di sediakan pemerintah. Sehingga PAD menjadi lebih besar karena adanya penyediaan pembiayaan pembangunan. Subjek Pajak Parkir ialah orang pribadi atau badan yang menyediakan tempat parkir. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut terjadi penurunan pendapatan pada sektor pajak parkir. Penyebabnya adalah maraknya parkir liar. Riza mengatakan, parkir liar ini masih menjadi masalah karena ketersediaan lahan. Ditahun 2019 memperoleh pendapatan Rp 525 Miliar sedangkan di tahun 2020, pihaknya hanya mendapatkan pendapatan Pajak Parkir senilai Rp 352 Miliar. (Jakarta.bpk.go.id).

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar dan Pajak Parkir terhadap PAD sudah cukup banyak diteliti seperti : Penelitian menurut (Saputra & Putri, 2020) tentang Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap PAD dapat disimpulkan bahwa PKB berpengaruh secara positif signifikan terhadap PAD. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh (Mufidah & Susyanti, 2017) tentang Analisis Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Retribusi Parkir terhadap PAD Kota Malang menyimpulkan bahwa Pajak

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Parkir, Pajak Restoran, dan Retribusi Parkir secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Malang. Menurut (Maharani & Isroah, 2019) tentang Analisis Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016 menyimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami pertumbuhan yang cenderung positif.

Berdasarkan hasil penelitian Ningsih (2018) tentang Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap PAD mendapatkan hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Menurut penelitian (SINDUA et al., 2020) tentang Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Terhadap PAD Pemerintah Kota Manado menarik kesimpulan yaitu Pajak Parkir tidak berdampak signifikan akan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado.

## 1.1 Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Baldrice (2017) Pendapatan Asli Daerah merupakan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri di pungut berdasarkan peraturan daerah yang sinkron dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku.

Dalam buku Mardiasmo (2019:16) Pajak Daerah yang kemudian disebut pajak, ialah orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa didasarkan oleh Undang-Undang yang partisipasinya wajib kepada Daerah yang terutang, yang gunanya bagi keperluan Daerah seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Menurut Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2015 Pajak Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda yang digunakan di jalan darat, dan digerakkan oleh mesin berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau kejadian terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir adalah kondisi tidak adanya pergerakan sebuah kendaraan yang bersifat sementara. Pajak Parkir dipungut atas pengelolaan tempat parkir di luar badan jalan, yang disajikan bertautan pokok usaha ataupun yang dijadikan sebagai suatu upaya, termasuk pengadaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

## 1.2 Pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan di DKI Jakarta dari tahun ketahun semakin meningkat jumlahnya. Sehingga dikarenakan jumlah yang meningkat sehingga berpengaruh akan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) hal itu tentunya akan berpengaruh juga terhadap jumlah penerimaan pajak. Berdasarkan penelitian Maharani & Isroah (2019) menyimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami perkembangan yang



menjurus positif. Kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sangat efektif.

*H<sub>1</sub>: Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.*

### 1.3 Pengaruh Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena tukar menukar, jual beli, warisan, hibah, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Masyarakat lebih memilih untuk membeli bekas pakai karena harga yang mudah dijangkau sehingga semakin meningkatnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Sehingga meningkatkan penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Berdasarkan penelitian Hayati S. (2018) bahwa Pajak Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di provinsi Lampung dari tahun 2011-2016, karena terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi di Lampung setiap tahunnya.

*H<sub>2</sub>: Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.*

### 1.4 Pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor, sedangkan Pajaknya dipungut pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor. Semakin meningkatnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor maka akan berpengaruh akan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Jakarta merupakan kota yang dipenuhi dengan kendaraan bermotor yang begitu banyak, dengan banyaknya kendaraan bermotor maka bertambahnya juga kebutuhan akan bahan bakar kendaraan tersebut sehingga potensi penerimaan pajak bahan bakar tersebut akan meningkat. Berdasarkan penelitian Ningsih (2018) mendapatkan hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Menurut Saputra & Putri (2020) dapat disimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

*H<sub>3</sub>: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.*

### 1.5 Pengaruh Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Pajak Parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Di Kota Jakarta banyak tempat wisata yang mempunyai potensi besar yang bisa dikunjungi oleh banyak turis lokal maupun turis mancanegara sehingga memberikan peluang pendapatan yang besar terhadap Pajak Parkir. Banyaknya turis lokal maupun turis mancanegara menggunakan kendaraan pribadi, adapun karya wisata yang menggunakan bus pariwisata sehingga sangat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan tempat parkir yang di sediakan pemerintah. Sehingga PAD menjadi lebih besar karena adanya penyediaan pembiayaan pembangunan. Berdasarkan penelitian Mufidah & Susyanti (2017) menyimpulkan bahwa Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Retribusi Parkir secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Malang. Menurut Sindua et al (2019) memperoleh hasil dari penelitian ini melalui uji secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Pajak Parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Kemudian, hasil uji secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado.

*H<sub>4</sub>: Pajak Parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.*





## 2. Metode Penelitian

Penggunaan objek pada penelitian merupakan jumlah penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta pada tahun 2011-2020 yang diambil dari pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Parkir. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah non-probability sampling yaitu purposive sampling yang merupakan teknik peneliti dalam menentukan sampel dengan menetapkan kriteria khusus sesuai dengan penelitian, yaitu: (1) Jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2011-2020; (2) Jumlah penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2011-2020; (3) Jumlah penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada tahun 2011-2020; (4) Jumlah penerimaan Pajak Parkir pada tahun 2011-2020.

### 2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah. Periode data yang digunakan pendapatan asli daerah adalah periode tahun 2011-2020 di DKI Jakarta.

### 2.2 Variabel Independen

#### 2.2.1 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Periode data yang digunakan adalah realisasi pajak kendaraan bermotor tahun 2011-2020 di DKI Jakarta.

#### 2.2.2 Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Periode data yang digunakan adalah realisasi pajak bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2011-2020 di DKI Jakarta.

#### 2.2.3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor, sedangkan Pajaknya dipungut pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor. Periode data yang digunakan adalah realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor tahun 2011-2020 di DKI Jakarta.

#### 2.2.4 Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Pajak Parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Periode data yang digunakan adalah realisasi pajak parkir tahun 2011-2020 di DKI Jakarta.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada table diatas, menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 data. Berdasarkan hasil output SPSS data penerimaan PAD terendah (minimum) adalah Rp 17.825.987.294.430,82 pada tahun 2011. Data penerimaan PAD tertinggi (maksimum) adalah Rp 45.707.400.003.802 pada tahun 2019. Rata-rata (mean) penerimaan PAD periode 2011-2020 adalah sebesar Rp 33.891.817.160.968.28 dan Standar deviasi adalah Rp 9.458.817.088.921,441, karena nilai mean lebih besar dari standar deviasi maka nilai mean dapat digunakan sebagai representasi yang baik dari keseluruhan data.

Data Pajak Kendaraan Bermotor memiliki nilai terendah (minimum) adalah Rp 3.664.400.165.006 pada tahun 2011 dan nilai tertinggi (maksimum) adalah Rp 8.844.155.231.721 pada tahun 2019. Rata-rata (mean) penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor periode 2011-2020 adalah sebesar Rp 6.387.227.719.839,20. Standar deviasi yang diperoleh adalah sebesar Rp 1.943.873.277.410,621 , karena



nilai mean lebih besar dari standar deviasi maka nilai mean dapat digunakan sebagai representasi yang baik dari keseluruhan data.

Data Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki nilai terendah (minimum) adalah Rp 3.669.362,320.550 pada tahun 2020 dan nilai tertinggi (maksimum) adalah Rp 6.143.969.692.650 pada tahun 2013. Rata-rata (mean) penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor periode 2011-2020 adalah sebesar Rp 5.090.032.160.437,00 yang menunjukkan bahwa dari tahun ketahun penerimaan pajaknya mengalami perubahan. Standar deviasi yang diperoleh adalah sebesar Rp 674.390.836.722,011 Karena nilai mean lebih besar dari standar deviasi maka nilai mean dapat digunakan sebagai representasi yang baik dari keseluruhan data.

Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor memiliki nilai terendah (minimum) Rp 848.569.568.929,00 pada tahun 2011 dan nilai tertinggi (maksimum) adalah Rp 1.262.748.852.467,00 pada tahun 2019. Nilai. Rata-rata (mean) penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor periode 2011-2020 adalah sebesar Rp 1.091.200.246.130,70 yang menunjukan bahwa dari tahun ketahun penerimaan pajaknya mengalami perubahan. Standar deviasi yang diperoleh adalah sebesar Rp 148.656.272.411,715. Karena nilai mean lebih besar dari standar deviasi maka nilai mean dapat digunakan sebagai representasi yang baik dari keseluruhan data.

Data Pajak Parkir memiliki nilai terendah (minimum) Rp 158.256.146.738,00 pada tahun 2011 dan nilai tertinggi (maksimum) adalah Rp 532.242.383.070,00 pada tahun 2019. Nilai. Rata-rata (mean) penerimaan Pajak Parkir periode 2011-2020 adalah sebesar Rp 388.804.668.811,30 yang menunjukan bahwa dari tahun ketahun penerimaan pajaknya mengalami perubahan. Standar deviasi yang diperoleh adalah sebesar Rp 126.613.056.326,387. Karena nilai mean lebih besar dari standar deviasi maka nilai mean dapat digunakan sebagai representasi yang baik dari keseluruhan data.

**Tabel 1: Hasil Statistik Deskriptif**

	<b>Dalam Miliar</b>			
	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Standar Deviasi</b>
PAD	17.82,0	45.707,4	33.891,8	9.458,8
PKB	3.664,4	8.844,2	6.387,2	1.943,9
BBNKB	3.669,4	6.144,0	5.090,0	674,4
PBBKB	848,6	1.262,7	1.091,2	148,7
P.PARKIR	158,3	532,2	388,8	126,6

Sumber: Hasil Output SPSS 25

### 3.2 Uji asumsi klasik

#### 3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel diatas diperoleh nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,200 yaitu  $> \alpha$  0,05, sehingga dapat diartikan bahwa residual data berdistribusi normal.

**Tabel 2: Hasil Uji Normalitas**

Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200
------------------------	-------

Sumber : Hasil Output SPSS 25

#### 3.2.2 Uji Multikolinearitas

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai Tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 maka dalam model regresi ini dapat diartikan bahwa antara variabel bebas yang terdapat dalam model menunjukkan tidak adanya multikolinearitas.



**Tabel 3: Hasil Uji Multikolinearitas**

Nama Uji		Variabel Independen			
		PKB	BBNKB	PBBKB	P. PARKIR
Multikolinearitas	VIF	1,867	1,116	2,594	2,931
	Tolerance	0,536	0,896	0,386	0,341

Sumber : Hasil Output SPSS 25

**3.2.3 Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Uji Run Test. Berdasarkan hasil uji autokorelasi, hasil menunjukkan bahwa nilai sig 1,000 > 0,05, artinya tidak terdapat adanya autokorelasi pada model regresi.

**3.2.4 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan uji *Glejser*, berdasarkan hasil uji tersebut menunjukan bahwa nilai signifikasinya diatas 0,05 hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model persamaan regresi sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi PAD berdasarkan variable yang mempengaruhinya .

**Tabel 4: Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Sig.
PKB	0,271
BBNKB	0,291
PBBKB	0,251
PAJAK_PARKIR	0,144

Sumber : Hasil Output SPSS 25

**Tabel 5: Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Coefficient	P-Value
(Constant)	-9.953.529.242.002,77	0,008
PKB	3,779	0,000
BBNKB	2,864	0,000
PBBKB	-2,339	0,214
P_PARKIR	19,762	0,001
Nilai F		354,778
Signifikansi F		0,000
Adjusted R Square		0,994

Sumber: Hasil Microsoft Excel

**3.3 Analisis Regresi Linier Berganda**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Excel diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$PAD = -9.953.529.242.002,77 + 3,779 PKB + 2,864 BBNKB - 2,339 PBBKB + 19,762 P.PARKIR$$

**3.4 Uji Statistik F (Uji Kelayakan Model)**

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dilindungi undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan hasil uji statistik F diperoleh nilai sig adalah  $0,000 < \alpha 0,05$  maka model regresi signifikan artinya layak untuk diuji. Hasil ini menunjukkan bahwa terbukti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Parkir secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD.

### 3.5 Uji Statistik t (Uji Signifikansi Parameter Individual)

Hasil tabel 5, diperoleh koefisien sebesar 3,770 yakni positif dengan nilai sig variabel Pajak Kendaraan Bermotor adalah 0,000 yang berarti nilai P-Value  $< \alpha 0,05$  (tolak  $H_0$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa terbukti Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Berdasarkan tabel 5, variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memperoleh koefisien sebesar 2,864 yakni positif dengan nilai P-Value sebesar 0,001 yang berarti nilai P-Value  $> \alpha 0,05$  (tolak  $H_0$ ). Hasil ini memberikan bahwa terbukti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Berdasarkan tabel 5, variabel Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor memperoleh koefisien sebesar 2,339 yakni negatif dengan nilai P-Value sebesar 0,214 yang berarti nilai P-Value  $> \alpha 0,05$  (tidak tolak  $H_0$ ). Hasil ini didapatkan bahwa tidak terbukti Pajak Parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Berdasarkan tabel 5, variabel Pajak Parkir memperoleh koefisien sebesar 19,762 yakni positif dengan nilai P-Value sebesar 0,001 yang berarti nilai P-Value  $< \alpha 0,05$  (tolak  $H_0$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa terbukti Pajak Parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

### 3.6 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pada tabel 5, hasil  $R^2$  sebesar 0,994 (99,4%) yang memiliki arti variabel Pendapatan Asli Daerah sebanyak 99,4% dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Parkir. Sedangkan, sisanya sebesar 0,6% (100%-99,4%) dijelaskan oleh sebab – sebab yang lain diluar model penelitian.

### 3.7 Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji statistik t dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai Beta 3,779 dan nilai sig 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha 0,05$  yang artinya tolak  $H_0$ . Hal ini sinkron dengan hipotesis yang disajikan oleh penulis bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pajak Kendaraan Bermotor maka semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun ke tahun berakibat meningkatnya juga Pendapatan Asli Daerah di Kota Jakarta. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di dasari karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu yang mendorong masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah menurun pada tahun 2014 sebesar 18,95% dari Rp 4.143.969.692.650 menjadi Rp 4.979.110.607.650 dan tahun 2020 turun sebesar 10,91% dari Rp 8.884.155.231.721 menjadi Rp 7.879.175.181.468 . Adapun anggaran dan realisasi yang tidak mencapai target yakni tahun 2014 sebesar 3,31% yang dimana anggarannya sebesar Rp 5.150.000.000.000 kemudian terealisasi hanya Rp 4.979.110.607.650 dan pada 2020 dikarenakan pandemi COVID-19 yaitu sebesar 2,01% dengan anggaran awal sebesar Rp 8.000.000.000.000 hanya terealisasi sebesar Rp 7.879.175.181.468 karena penerimaan pajak lainnya yang juga meningkat.

Kemudian penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2011 hingga 2017 mengalami peningkatan sedangkan ditahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1% dan ditahun 2020 mengalami penurunan kembali sebesar 18% dikarenakan terjadinya wabah virus COVID-19. Selain tahun tersebut, tahun yang lainnya sudah mencapai target yang ditetapkan. Hasil penelitian ini sesuai dengan Maharani & Isroah (2019) menyimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami perkembangan yang menjurus positif.

### 3.8 Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Hasil uji statistik t dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai Beta 2,864 dan nilai sig 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha 0,05$  yang artinya tolak  $H_0$ . Hal ini sinkron dengan hipotesis yang disajikan oleh





penulis bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor maka semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pertumbuhan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun ke tahun berakibat meningkatnya juga Pendapatan Asli Daerah di Kota Jakarta. Peningkatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini disebabkan harga kendaraan bermotor yang selalu mengalami peningkatan sehingga tidak semua kalangan masyarakat mampu untuk membeli kendaraan bermotor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih alternatif lain seperti membeli kendaraan bekas yang masi layak pakai. Penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menurun pada tahun 2014 yakni sebesar 10,05% dari Rp 6.143.969.692.650 menjadi Rp 5.526.393.737.100 dan tahun 2020 turun sebesar 32,09% dari Rp 5.403.535.434.750 menjadi Rp 3.669.362.320.550. Adapun anggaran dan realisasi yang tidak mencapai target yaitu tahun 2014 sebesar 13,65% dengan anggaran Rp 6.400.000.000.000 hanya terealisasi sebesar Rp 5.526.393.737.100, pada tahun 2019 sebesar 4,36% dengan anggaran sebesar Rp 5.650.000.000.000 terealisasi hanya sebesar Rp 5.403.535.434.750 dan pada tahun 2020 yakni adanya pandemic COVID-19 turun sebesar 0,82% dari anggaran awal sebesar Rp 3.700.000.000.000 terealisasi hanya Rp 3.669.362.320.550 karena penerimaan pajak lainnya juga meningkat.

Kemudian penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2011 hingga 2017 mengalami peningkatan sedangkan ditahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1% dan ditahun 2020 mengalami penurunan kembali sebesar 18% dikarenakan terjadinya wabah virus COVID-19. Selain tahun tersebut, tahun yang lainnya sudah mencapai target yang ditetapkan. Hasil penelitian ini sinkron dengan Hayati S. (2018) bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan mempunyai dampak secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada provinsi Lampung dari tahun 2011-2016, sebab terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi di Lampung setiap tahunnya.

### 3.9 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Hasil uji statistik t dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai Beta -2,339 dan nilai sig 0,214 lebih besar dari nilai  $\alpha$  0,05 yang berarti tidak tolak  $H_0$ . Hal ini tidak selaras dengan hipotesis yang disajikan oleh penulis bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap PAD.

Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami penurunan ditahun 2016 sebesar 11,18% dari Rp 1.232.836.931.554 menjadi 1.094.901.392.986 dan tahun 2020 sebesar 21,18% dari Rp 262.748.852.467 menjadi Rp 995.177.276.015. Adapun anggaran dan realisasi dari tahun 2012-2015 tidak tercapai dan ditahun 2019 target juga tidak tercapai. Kemudian penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2011 hingga 2017 mengalami peningkatan sedangkan ditahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1% dan ditahun 2020 mengalami penurunan kembali sebesar 18% dikarenakan terjadinya wabah virus COVID-19. Selain tahun tersebut, tahun yang lainnya sudah mencapai target yang ditetapkan..

Semua jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi objek PBBKB yang dapat meningkatkan penerimaan negara maupun daerah. Semakin tinggi tarif PBBKB seharusnya diikuti kenaikan harga jual per liter BBM. Akan tetapi untuk sebagian jenis BBM yaitu premium dan solar masih bersubsidi sehingga tidak dinaikkan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotornya. Karena jika tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dinaikkan maka harga jual Bahan Bakar Minyak tersebut per liter akan ikut mengalami kenaikan. Jadi hal tersebut yang menyebabkan pendapatan daerah dari PBBKB menjadi kurang maksimal. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ningsih (2018) bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

### 3.10 Pajak Parkir

Nilai uji statistik t dalam pengkajian ini memperoleh hasil bahwa Pajak Parkir berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai Beta 19,762 dan nilai sig 0,001 lebih kecil dari nilai  $\alpha$  0,05 yang artinya tolak  $H_0$ . Hal ini sinkron dengan hipotesis yang disajikan oleh penulis bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Di Kota Jakarta banyak tempat wisata yang mempunyai potensi besar yang bisa dikunjungi oleh banyak turis lokal maupun turis mancanegara sehingga memberikan peluang pendapatan yang besar terhadap Pajak Parkir. Banyaknya turis lokal maupun turis mancanegara menggunakan kendaraan pribadi, adapun karya wisata yang menggunakan bus pariwisata sehingga sangat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan tempat parkir yang di sediakan pemerintah. Penerimaan dari Pajak Parkir meningkat dari tahun 2011 hingga 2019 pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 36,89% dari Rp

532.242.383.070 menjadi Rp 335.892.300.849. Adapun anggaran dan realisasi yang tidak tercapai yakni tahun 2011, 2014, kemudian 2016-2019 dengan rata-rata penurunan sebesar 16,04%.

Kemudian penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011 hingga 2017 mengalami peningkatan sedangkan ditahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1% dan ditahun 2020 mengalami penurunan kembali sebesar 18% dikarenakan terjadinya wabah virus COVID-19. Selain tahun tersebut, tahun yang lainnya sudah mencapai target yang ditetapkan. Karena tidak tercapainya target dari tahun yang telah disebutkan maka hal ini menjadi salah satu faktor tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini sesuai dengan Mufidah & Susyanti (2017) yang menyimpulkan bahwa Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Retribusi Parkir secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.

#### 4. Kesimpulan Dan Saran

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan pengaruh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Parkir terhadap PAD. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dan pengolahan data yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Terbukti bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah; (2) Terbukti bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah; (3) Tidak terdapat cukup bukti bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah; (4) Terbukti bahwa Pajak Parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah dijabarkan, serta mengingat adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya dalam penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan penulis yaitu sebagai berikut: (1) Bagi peneliti selanjutnya yang akan menggunakan topik Pajak Daerah, semestinya menambahkan variabel pajaknya ataupun periode tahunnya bisa menggunakan data perbulan agar hasil yang didapat lebih baik dan maksimal. Peneliti selanjutnya bisa mengambil penelitian di wilayah terbesar dan sangat berdampak juga diharapkan peneliti berikutnya bisa memastikan apakah data yang diambil sudah lengkap atau belum; (2) Bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat meningkatkan target Pajak Daerah terutama Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Parkir agar PAD semakin meningkat juga dan dapat dilaksanakannya pembangunan daerah. Pemerintah daerah sebaiknya mencari sumber penerimaan lain untuk menggantikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor karena saat ini banyak mobil listrik yang membuat penerimaan pajak menjadi menurun; (3) Bagi BPRD Provinsi DKI Jakarta diharapkan menerapkan pengecekan berkala dan melakukan pendataan lebih lanjut dan sesuai dengan investigasi dilapangan BPRD harus lebih kooperasi bersama Dirlantas Polda Metro Jaya untuk menagih para penunnggak pajak, dengan melakukan operasi gabungan sehingga terlihat yang menunggak pajak dan menyuruhnya segera melakukan pembayaran tunggakannya tersebut sehingga bisa meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

#### Daftar Pustaka

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Malang :Universitas Brawijaya Press.
- Bapenda Jakarta, pajakonline.com, diakses 8 Desember 2021, <https://pajakonline.jakarta.go.id/>
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), bprd.jakarta.go.id, diakses 8 Desember 2021, <https://bprd.jakarta.go.id/halaman/bea-balik-nama-kendaraan-bermo>
- BPK RI, *Marak Parkir Liar Pendapatan Pajak Parkir DKI Merosot 50 persen*, jakarta.bpk.go.id, diakses 8 Desember 2021, <https://jakarta.bpk.go.id/marak-parkir-liar-pendapatan-pajak-parkir-dki-merosot-50-persen/>
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Firdausy, C. (2018). *Kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hayati, S. (2018). *Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Provinsi Lampung Tahun 2011-2016 (Studi Analisis Pada Badan Pendapatan Daerah Di Provinsi Lampung)*.



UIN Raden Intan Lampung.

- Maharani, C. S., & Isroah, I. (2019). *Analisis Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016*. Dalam *Jurnal Yang Diakses Pada*, 2.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Edisi 2019. Yogyakarta: Andi.
- Mufidah, A., & Susyanti, J. (2017). *Analisis pengaruh pajak parkir, pajak restoran dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang (Studi kasus badan pengelola keuangan dan aset daerah Kota Malang)*. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 6(02).
- Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Bapenda DKI: Tidak ada, bisnis.com, diakses 8 Desember 2021, <https://jakarta.bisnis.com/read/20200908/77/1288949/pemutihan-denda-pajak-kendaraan-bermotor-bapenda-dki-tidak-ada>
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2010 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga Atas Undang –Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus*. Edisi 11. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Saputra, E., & Putri, N. E. (2020). *Pengaruh PKB, BBNKB, Dan PBBKB Terhadap PAD (Studi pada Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010–2019)*. *IKRA-ITH EKONOMIKA*, 3(3), 134–144.
- SINDUA, R. I., Taroreh, F. J. H., & Honandar, I. R. (2020). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Pemerintah Kota Manado Tahun 2014-2018)*. *Universitas Katolik De La Salle*
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.